

SKRIPSI

**PERKEMBANGAN PENGATURAN PEMBATASAN MASA JABATAN
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program S1 Pada

Fakultas Hukum Universitas Andalas



OLEH :

AZHARI FADIL

1610111051

PK HUKUM TATA NEGARA (PK V)

Pembimbing :

Arfiani, S.H, M.H

Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

**PERKEMBANGAN PENGATURAN PEMBatasan MASA Jabatan
PRESIDEN DAN Wakil PRESIDEN DALAM Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

**Azhari Fadil, 1610111051, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, PK V
(Hukum Tata Negara), 68 halaman, 2020**

ABSTRAK

Pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dalam konstitusi, mulai dari awal kemerdekaan, Indonesia menganut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), kemudian Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), dan terakhir konstitusi Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 sebelum amandemen pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan diantaranya yaitu memilih Soekarno menjadi Presiden seumur hidup dan Soeharto yang menjabat selama 32 Tahun di Indonesia yang memerintah secara otoriter. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah *pertama* bagaimana perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan yang *kedua* adalah bagaimana pentingnya pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder, serta metode pengumpulan data berupa studi dokumen (kepustakaan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan mengetahui pentingnya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hasil penelitian pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen terdapat perbedaan-perbedaan, baik bunyi Pasal maupun penerapan pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia sangatlah penting, karena berangkat dari sejarah pemerintahan jika dipimpin oleh pemimpin yang sama dalam jangka waktu yang panjang maka dapat menimbulkan pemerintahan yang otoriter. Adanya pengaturan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 7 UUD 1945 setelah amandemen, maka terjadi *check and balances* antar lembaga-lembaga negara dan juga mencegah terjadinya kekuasaan absolut dari Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia serta tidak menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam terkait pengaturan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.